

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA LALU LINTAS AKIBAT KELALAIAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN

(Studi Kasus Putusan Nomor : 181/Pid.B/2015/PN.Mks)



**OLEH :
MUHAMMAD AKBAR
B111 12 903**

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2016**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA LALU LINTAS AKIBAT
KELALAIAN HILANGYA NYAWA ORANG LAIN**

(Studi Kasus Putusan Nomor : 181/Pid.B/2015/PN.Mks)

Oleh:

MUHAMMAD AKBAR

B111 12 903

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Tugas dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum**

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2016

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA LALU LINTAS AKIBAT KELALAIAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN (Studi Kasus Putusan Nomor: 181/Pid.B/2015/PN.Mks)

Disusun dan diajukan oleh

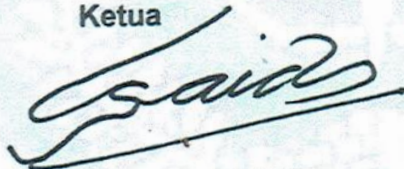
MUHAMMAD AKBAR

B111 12 903

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Jumat Tanggal 25 Februari 2016
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

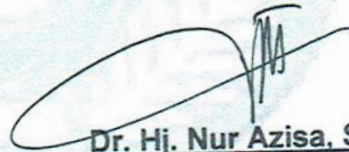
Ketua



Prof. Dr. H. M Said Karim, S.H., M.H. M.Si

NIP. 19620711 198703 1 001

Sekretaris



Dr. Hj. Nur Azisa, S.H., M.H.

NIP. 19671010 1992032 002

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.

NIP. 19610607 198601 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUHAMMAD AKBAR

Nomor Pokok : B111 12 903

Prodi : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian
Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa
Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor :
181/Pid.B/2015/PN.Mks).

Telah Diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

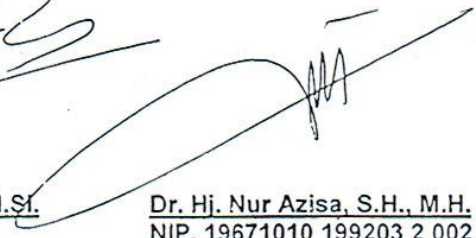
Makassar, Januari 2016

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. H. M. Said Karim, SH., MH., M.Si.
NIP. 196620711 198703 1 001



Dr. Hj. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 19671010 199203 2 002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

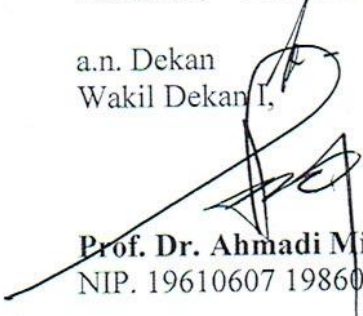
Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **MUHAMMAD AKBAR**
No. Pokok : B111 12 903
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian
Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa
Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor:
181/Pid.B/2015/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2016

a.n. Dekan
Wakil Dekan I,


Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H.,M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003

ABSTRAK

MUHAMMAD AKBAR (B11112 903), TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KELALAIAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN (Studi Kasus Putusan Nomor. 181/Pid.B/2015/PN/Mks), di bawah bimbingan H. M.Said Karim sebagai Pembimbing I dan Nur Azisa sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindakpidana kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dalam putusan Nomor 181/Pid.B/2015/PN.Mks dan mengetahui pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman berupa pemidanaan terhadap tindak pidana kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain Nomor 181/Pid.B/2015/PN.Mks.

Penelitian ini dilakukan di Makassar, yaitu di Pengadilan Negeri Makassar. Penelitian ini dilakukan dengan cara pengambilan data melalui penelitian kepustakaan dan wawancara dengan pihak yang bersangkutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam putusan No. 181/Pid.B/2015/PN.Mks, surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil dan materil. Dalam tuntutananya, Penuntut Umum menuntut terdakwa bersalah melakukan tindak pidana kelalaian lalu lintas Pasal 311 ayat (5) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan dakwaan kesatu, berdasarkan fakta-fakta hukum baik keterangan saksi maupun keterangan terdakwa serta unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaaan tersebut dianggap telah terbukti oleh Jaksa Penutut Umum sehingga antara perbuatan dan unsur-unsur pasal saling mencocoki dan pertimbangan Hakim dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam perkara ini telah sesuai dimana hakim telah mempertimbangkan baik dari pertimbangan yuridis, fakta-fakta persidangan, keterangan para saksi, alat bukti yang ada, keyakinan hakim serta hal-hal yang mendukung. Dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, oleh karena terbukti bersalah maka terdakwa dijatuhi pidana yang dipandang setimpal dengan perbuatannya.

KATA PENGANTAR



Assalamuakaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah, segala puji penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KELALAIAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN (Studi Kasus Putusan Nomor. 181/Pid.B/2015/PN/Mks)”** dapat diselesaikan.

Skripsi ini disusun berdasarkan data-data hasil penelitian sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dengan rendah hati penulis sampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya untuk orang tua, Ayahanda tercinta **KAMARUDDIN** dan Ibunda tercinta **ASMI ILYAS** atas doa yang tidak pernah putus, pengertian, kasihsa yang dan pengorbanan untuk anak-anaknya. Begitu pula kepada **Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.** dan **dr. Yuyun Widamingsih, S.PK** atas perhatian dan didikannya terhadap penulis selama kuliah sehingga bisa menyelesaikan studi ini dengan baik. Begitu pula Kepada saudara-saudariku tercinta **NOVITA SARY, S.Kep, MUHAMMAD AKHSAN** Serta **KELUARGA BESAR PENULIS** terima kasih atas doa,dukungan dan kasih sayangnnya sampai saat ini hingga nanti, semoga tetap berada dalam lindungan-Nya. Aamiin.

Tidak lupa penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang setinggi-tingginya kepada **Bapak Prof. Dr. H. M. SAID KARIM, S.H., M.H, M.Siselaku** Pembimbing I dan **Ibu Dr. Nur Azisah , S.H., M.H.** selaku Pembimbing Ilyang banyak meluangkan waktu ditengah kesibukan, beliau senantiasa dengan sabar memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan serta motivasi kepada penulis.

Dengan segala kerendahan hati, tak lupa penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, yakni terurai sebagai berikut:

1. Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A** selaku Rektor Unhas
2. Ibu **Prof. Dr. Farida Pattitingi S.H., M.H** sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak **Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H** sebagai Wakil Dekan I, dan Bapak **Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H** sebagai Wakil Dekan II, dan Bapak **Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H** sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak **Dr. Amir Ilyas, SH., M.H, Dr. Abd. Asis, S.H., M.H** dan Ibu **Dr. Hj. Haeranah, S.H., M.H** selaku penguji.
5. Seluruh staf dosen pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak sempat disebutkan namanya satu demi satu,;
6. Seluruh staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu kelancaran dan kemudahan

penulis, sejak mengikuti perkuliahan, proses belajar sampai akhir penyelesaian studi ini.

7. Seluruh Mace-mace dikantin Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terkhusus buat Mace Dede, yang sangat membantu penulis mulai dari awal perkuliahan hingga akhir penyelesaian studi ini.
8. Bapak **Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum** selaku Hakim di Pengadilan Negeri Makassar dan Bapak **Mustari, S.H** yang telah memberikan arahan dan masukan guna kelancaran penelitian ini.
9. Buatsaudara-saudaraku **KBLH Angkatan 2012** yang telah menjadi teman, sahabat, serta saudara selama perjalanan kita di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
10. Buat kakak-kakak penulis **Arlo Abdillah, S.H., Ardiansyah Kandow, S.H., Asrul, S.H., Adi Nur Akbar Ali, S.H., Hadrian Tri Saputra, S.H.** yang selalu membimbing dan memberi dorongan kepada penulis.
11. Buat adik-adik penulis **Muh. Kurniawansyah, Muh. Rivai S., Muh. Jabal Nur, Abd. Malik, Lukman Alamsah, Kasmanto Saputra, Muh Agung Pratama, Andi salman Faris, Kifli Aras, Iwan syam, Andi Ahmad Riady** yang selalu memberikan semangat bagi penulis selama dalam penulisan skripsi ini.
12. Seluruh Keluarga Besar Penulis yang Terlahir melalui proses Kebersamaan hingga kami menjadi Saudara mulai dari Penulis

menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum hingga akhir hayat penulis
(KBLH)

13. Teman-teman angkatan dan teman seperjuangan penulis **PETITUM
2012.**

14. Teman-teman **KKN Gelombang 90 Desa Bola Patapuloe
Kecamatan Wattang Sawitto Kabupaten Pinrang.**

Akhirnya kepada semua pihak yang tak sempat disebutkan namanya satu demi satu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih dengan tumpuan harapan semoga Allah SWT membalas segala budi baik para pihak yang telah membantu penulis dan semuanya menjadi pahala ibadah, Aamiin

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Makassar, Januari 2016

MUHAMMAD AKBAR

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tinjauan Yuridis	6
B. Tindak Pidana	
1. Pengertian Tindak Pidana	7
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	10
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	11
C. Kesalahan	16
1. Kesengajaan (<i>Dolus</i>)	17
2. Kealpaan (<i>Culpa</i>)	18
D. Lalu Lintas	
1. Pengertian Lalu Lintas	20
2. Kecelakaan Lalu Lintas	21
3. Ketentuan Pidana Dapat Dijatuhkan Pada Kecelakaan Lalu Lintas	22
4. Ketentuan Lalu Lintas	26
5. Jenis Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas	28
E. Tindak Pidana Kealpaan yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain.	
1. Dasar Hukum Tindak Pidana Kealpaan	28

2. Unsur Delik Karena Kealpaan yang Menyebabkan Matinya Orang Lain	29
F. Putusan	
1. Pengertian Putusan	31
2. Jenis-Jenis Putusan	31
G. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara	
1. Pertimbangan Yuridis	34
2. Pertimbangan Sosiologis	36

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian.....	38
B. Jenis dan Sumber Data	38
C. Teknik Pengumpulan Data	39
D. Teknik Analisis Data	40

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Dalam Putusan Nomor. 181/Pid.B/2015/PN.Mks	
1. Posisi Kasus	41
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	42
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	54
4. Amar Putusan	55
5. Analisa Penulis	56
B. Pertimbangan Hukum Oleh Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Berupa Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Dalam Putusan Nomor. 181/Pid.B/2015/PN.Mks.	
1. Pertimbangan Hakim	61
2. Analisis Penulis	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia selalu terikat dengan Hukum, Sesuai dengan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD NKRI 1945) setelah amandemen yaitu Pasal 1 Ayat (3); “Indonesia ialah Negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*)”. Indikasi bahwa Indonesia menganut konsepsi *welfare state* terdapat pada kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuan-tujuan negara, sebagaimana yang termuat dalam alinea keempat Pembukaan UUD NKRI 1945, yaitu : “Melindungi segenap bangsa Indonesi dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia”.

Tujuan-tujuan ini diupayakan perwujudannya melalui pembangunan yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam program jangka pendek, menengah, dan panjang.

Pembangunan yang dilaksanakan Indonesia adalah pembangunan disegala bidang yang merupakan suatu bagian dari proses modernisasi untuk menciptakan kesejahteraan dan ketentraman bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan yang ada sekarang ini tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan yang paling sering kita temui adalah tingginya tingkat kemacetan pada jam-jam sibuk. Kemacetan merupakan salah satu dampak negatif dari semakin majunya pembangunan terkhusus dibidang

produksi kendaraan bermotor yang pada gilirannya menyebabkan semakin simpang siurnya lalu lintas jalan raya, hal ini disebabkan tidak berbandingnya jumlah kendaraan dan jumlah jalan pada akhirnya para penggunaan jalan raya akan semakin tidak nyaman.

Ketidaknyamanan pengguna jalan raya dalam aktivitasnya mendatangkan dampak yang sangat besar yaitu semakin tingginya beban psikologis, sehingga dapat menyebabkan stres yang berkepanjangan dan pada akhirnya menimbulkan kelalaian maupun kealpaan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pengguna jalan raya yang tentu saja dapat merugikan dirinya dan orang lain.

Hukum dan fungsinya mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusi secara maksimal kepada pelaksanaan jika aparat penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap norma hukum. Dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas (lakalantas) haruslah dipisahkan antara pelanggaran dan kejahatan. Karena untuk melakukan penuntutan didepan hukum maka kejadian yang terjadi haruslah merupakan kejahatan, sementara pada kecelakaan lalu lintas kejahatan yang terjadi merupakan kejahatan yang tidak disengaja atau dikarenakan oleh tindakan kelalaian atau kealpaan.

Tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas (lakalantas) diakibatkan dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pengemudi kendaraan bermotor dengan berbagai faktor yang melekat pada dirinya misalnya dalam hal kebugaran jasmani, kesiapan mental, pada saat pengemudi

kelelahan, pengaruh minuman keras dan obat-obat terlarang. Kondisi ketidaksiapan pengemudi membuka peluang besar terjadinya kecelakaan yang parah disamping membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lainnya lengah, mengantuk, kurang terampil, lelah, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat adalah contoh kesalahan pengemudi pada umumnya. Selain penyebab-penyebab kecelakaan lalu lintas yang telah diuraikan diatas, terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya juga dipengaruhi oleh faktor usia pengemudi, analisa data yang dilakukan oleh direktorat jenderal perhubungan darat menunjukkan bahwa pengemudi berusia 16-30 tahun adalah penyebab terbesar kecelakaan lalu lintas.

Tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya meningkat dengan jumlah korban yang tidak sedikit yang diakibatkan karena kelalaian atau kealpaan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Berkaitan dengan judul yang dipilih oleh penulis, maka adapun contoh kasus yang akan penulis kaji secara lebih lanjut adalah Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 181/Pid.B/2015/PN.Mks yang duduk perkaranya secara garis besar adalah sebagai berikut :

Kecelakaan Lalu lintas terjadi pada hari Minggu tanggal 30 November 2014 sekitar pukul 05.30 Wita, bertempat di jalan Jend.M.Yusuf Makassar yang dulu bernama jalan Gunug Bulusaraung Makassar. Bermula terdakwa dari Discotik Retro Hotel Clarion Makassar hendak pulang kerumahnya dengan mengendarai mobil Nissan Grand Livina warna putih

dengan nomor polisi DD 1074 XJ dimana saat terdakwa melintas di jalan Jend. M. Yusuf Makassar terdakwa tertidur akibat pengaruh minuman beralkohol dan ekstasi yang sebelumnya dikonsumsi oleh terdakwa sehingga mobil yang dikendarainya naik keatas trotoar sebelah kiri jalan yang kemudian mobil terdakwa tersebut menabrak korban Jefry Jaury yang sedang berjalan di atas trotoar hingga korban Jefry Jaury terlempar sekitar 10 meter dari tempat tabrakan tersebut lalu mobil yang dikemudikan terdakwa tersebut kembali menabrak gapura jalan dan mobil yang sedang terparkir di lokasi tersebut hingga mobil yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut terbalik, dan akibat perbuatan tersangka tersebut sehingga menyebabkan korban Jefry Jaury meninggal dunia di lokasi tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji sebagai bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor 181/Pid.B/2015/PN.Mks).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dalam putusan Nomor 181/Pid.B/2015/PN.Mks ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman berupa pembedaan terhadap tindak pidana

kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dalam putusan Nomor 181/Pid.B/2015/PN.Mks ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dalam putusan Nomor 181/Pid.B/2015/PN.Mks.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman berupa pemidanaan terhadap tindak pidana kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dalam putusan Nomor 181/Pid.B/2015/PN.Mks.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut :

1. Diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum di Indonesia, khususnya mengenai kelalaian dalam berlalu lintas.
2. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menambah bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan pada khususnya bagi penulis sendiri dalam menambah pengetahuan tentang ilmu hukum.
3. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan penegakan hukum di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tinjauan Yuridis

Yang dimaksud dengan tinjauan adalah penguraian atau penyelidikan suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman dari arti keseluruhan. Sedangkan yuridis berarti menurut hukum atau secara hukum.

Berdasarkan penguraian tersebut penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tinjauan yuridis adalah suatu kegiatan untuk menyelidiki suatu peristiwa dari sudut pandang (*point of view*) hukumnya. Tinjauan yuridis disini berarti hukum pidana materil.

Hukum pidana materil adalah isi atau substansi dari hukum pidana, dimana hukum pidana materil mengandung petunjuk-petunjuk dan uraian tentang syarat-syarat *Strafbaar feit* (delik; perbuatan pidana; tindak pidana) peraturan tentang syarat-syarat *Strafbaar heid* (hal dapat dipidanya seseorang), penunjukan orang yang dapat dipidana dan ketentuan tentang pidananya, hukum pidana materil menetapkan siapa dan bagaimana orang itu dapat dipidana.

Menurut Van Hattum (Lamintang, 1997: 10), hukum pidana materil yaitu semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan yang mana adalah merupakan tindakan-tindakan yang dapat dihukum, siapakah orangnya yang dapat dipertanggungjawabkan

terhadap tindakan-tindakan tersebut dan hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan terhadap orang tersebut, disebut juga dengan hukum pidana yang abstrak.

Dengan kata lain, hukum pidana materil (hukum pidana substantif), adalah seluruh peraturan yang memuat rumusan :

1. Perbuatan-perbuatan apakah yang diancam pidana;
2. Siapakah yang dapat dipidana, atau dengan kata lain mengatur pertanggungjawaban terhadap hukum pidana;
3. Pidana apakah yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana sama pengertiannya dengan peristiwa pidana atau delik. Menurut rumusan para ahli hukum dari terjemahan *strafbaar feit* yaitu suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang atau hukum, perbuatan mana dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Strafbaar feit merupakan istilah dari bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana,

peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straff* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Selain istilah *straffbaar feit*, dipakai istilah yang lain yang berasal dari bahasa latin “*delictum*”. Dalam bahasa Jerman disebut “*delict*”, dalam bahasa Perancis disebut “*delit*” dan dalam bahasa Indonesia disebut sebagai delik.

Amir Ilyas (2012:28) menjelaskan tindak pidana adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang (mencocoki rumusan delik);
2. Memiliki sifat melawan hukum; dan
3. Tidak ada alasan pembenar

Wirjono Prodjodikoro (2003:1) menjelaskan istilah tindak pidana dalam bahasa asing adalah “*delict*” yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.

Moeljatno (Adami Chazawi, 2002:71) memberikan definisi tentang *strafbaarfeit* menggunakan istilah perbuatan pidana.

Beliau mendefinisikan perbuatan pidana sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana di sertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.

Selanjutnya menurut Achmad Ali (2002:15) mengemukakan bahwa :

Pengertian tindak pidana (delik) adalah pengertian umum tentang semua perbuatan yang melanggar hukum ataupun perundang-undangan dengan tidak membedakan apakah pelanggaran itu dibidang hukum privat ataupun hukum publik termasuk hukum pidana.

Selanjutnya Pompe (Lamintang, 1997:82) perkataan tindak pidana itu dari dua segi, yaitu :

- a. Dari segi teoritis, tindak pidana dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib umum) yang dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu, demi terpeliharanya tertib umum dan terjaminnya kepentingan umum.
- b. Dari segi hukum positif, tindak pidana adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut rumusan Undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dihukum.

Dalam hukum pidana dikenal delik formil dan delik materil. Bahwa yang dimaksud delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-undang. Di sini rumusan dari perbuatan jelas, misalnya Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum

Pidana tentang pencurian. Adapun delik materil adalah delik yang yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan, misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno (2002:58) mengemukakan bahwa “unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan dalam Undang-undang (selanjutnya disingkat UU) syarat formil dan sifatnya melawan hukum syarat materil”.

Selanjutnya Moeljatno (2002:58) unsur-unsur tindak pidana terdiri dari :

1. Kelakuan dan akibat
2. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan yang dibagi menjadi :
 - a. Unsur subjektif atau pribadi yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan.
 - b. Unsur subjektif atau non pribadi yaitu mengenai keadaan diluar si pelaku.

Menurut Tongat (2009:105) menjelaskan bahwa terjadinya tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun negatif (tidak berbuat);
2. Diancam pidana;
3. Melawan hukum;
4. Dilakukan dengan kesalahan;
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab;
6. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Dibawah ini akan disebutkan berbagai pembagian jenis delik :

a. Kejahatan dan pelanggaran

Pembagian delik atas kejahatan dan pelanggaran ini disebut oleh undang-undang. KUHP Buku ke II memuat delik-delik. KUHP tidak memberi jawaban tentang hal ini. Ia hanya membrisir atau memasukkan dalam kelompok pertama kejahatan dan dalam kelompok kedua pelanggaran. Tetapi ilmu pengetahuan mencari secara intensif ukuran (kriterium) untuk membedakan kedua jenis delik itu. Ada dua pendapat :

Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif. Dengan ukuran ini lalu di dapati 2 jenis delik, ialah :

1. *Rechtdelicten* ialah yang perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misal : pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam ini disebut “kejahatan” (mala perse).
2. *Wetsdelicten* ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-

undang mengancamnya dengan pidana. Misalnya : memarkir mobil di sebelah kanan jalan (*mala quia prohibita*). Delik-delik semacam ini disebut “pelanggaran”. Perbedaan secara kualitatif ini tidak dapat diterima, sebab ada kejahatan yang baru disadari sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang pidana, jadi sebenarnya tidak segera dirasakan sebagai bertentangan dengan rasa keadilan. Dan sebaliknya ada “pelanggaran”, yang benar-benar dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan. Oleh karena perbedaan secara demikian itu tidak memuaskan maka dicari ukuran lain.

Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kuantitatif. Pendirian ini hanya meletakkan kriterium pada perbedaan yang dilihat dari segi kriminologi, ialah “pelanggaran” itu lebih ringan dari pada “kejahatan”. Mengenai pembagian delik dalam kejahatan dan pelanggaran itu terdapat suara-suara yang menentang. Seminar Hukum Nasional 1963 tersebut di atas juga berpendapat, bahwa penggolongan-penggolongan dalam dua macam delik itu harus ditiadakan.

1. Kejahatan ringan :

2. Dalam KUHP juga terdapat delik yang digolongkan sebagai kejahatan-kejahatan misalnya Pasal 364, 373, 375, 379, 382, 384, 352, 302 (1), 315, dan 407.

b. Delik Formil dan Delik Materil

- a. Delik formil itu adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Misal : penghasutan (Pasal 160 KUHP), di muka umum menyatakan perasaan kebencian, permusuhan atau penghinaan kepada salah satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia (Pasal 156 KUHP); penyuapan (Pasal 209, 210 KUHP); sumpah palsu (Pasal 242 KUHP); pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP); pencurian (Pasal 362 KUHP).
- b. Delik materiil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan. Misal : pembakaran (Pasal 187 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP).

- c. Delik *commisionis*, delik *ommisionis*, dan delik *commisionis per ommissionen commiss*.

- a. Delik *commisionis* : delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan.
- b. Delik *ommisionis* : delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/yang diharuskan, misal : tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP).
- c. Delik *commisionis per ommisionen commissa* : Delik yang berupa pelanggaran larangan (*dus delik commissiois*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misal : seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP), seorang penjaga wissel yang menyebabkan kecelakaan kereta api dengan sengaja tidak memindahkan wissel (Pasal 194 KUHP).
- d. Delik Dolus dan Culpa (*doleuse en culpose delicten*).
 - a. Delik dolus : delik yang memuat unsur kesengajaan, misal : Pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP
 - b. Delik culpa : delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur misal : Pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat 4 dan Pasal 359, 360 KUHP.

e. Delik tunggal dan delik berangkai (*enkelvoudige en samengestelde delicten*)

1. Delik tunggal : delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.
2. Delik berangkai : delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misal : Pasal 481 (penadahan sebagai kebiasaan)

f. Delik yang berlangsung terus (*voordurende en aflopende delicten*)

Delik yang berlangsung terus adalah delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misal : merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP).

g. Delik biasa dan delik aduan

Delik biasa adalah delik yang untuk dilakukannya penuntutan pidana tidak diisyaratkan adanya aduan dari yang berhak. Sedangkan delik aduan adalah delik yang untuk dilakukannya penuntutan pidana diisyaratkan adanya aduan dari yang berhak. Contoh :

Delik Biasa : Pembunuhan (Pasal 338 KUHP)

Delik Aduan : Pencemaran (Pasal 310 KUHP), Fitnah (Pasal 311 KUHP)

h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya

peringannya (*eenvoudige* dan *gequalificeerde / geprivilegieerde delicten*)

Delik yang ada pemberatannya, misal : penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari dsb. (Pasal 363).

Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misal : pembunuhan kanak-kanak (Pasal 341 KUHP). Delik ini disebut “geprivelegeerd delict”. Delik sederhana; misal : penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).

i. Delik ekonomi (biasanya disebut tindak pidana ekonomi) dan bukan delik ekonomi

Apa yang disebut tindak pidana ekonomi itu terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Darurat No. 7 tahun 1955, Undang-Undang darurat tentang tindak pidana ekonomi.

C. Kesalahan

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab.

Dalam hukum pidana menurut Moeljatno (Amir Ilyas, 2012:77) :

Kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, bila tindakannya memuat 4 (empat) unsur yaitu :

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab;
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*Dolus*) dan kealpaan (*Culpa*);
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Menurut Bahder Johan Nasution (Amir Ilyas, 2012:78) bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari :

1. Kesengajaan (*Dolus*), dan
2. Kealpaan (*Culpa*).

1. Kesengajaan (*Dolus*)

Hampir semua tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan bukan unsur kealpaan ini layak oleh karena biasanya yang pantas mendapatkan hukuman pidana itu ialah orang yang melakukan dengan sengaja.

Menurut Wirjono Prodjodikoro (Amir Ilyas, 2012:78) kesengajaan dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu :

- a. Sengaja sebagai niat
Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*) si pelaku dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Maka apabila kesengajaan semacam ini ada pada suatu tindak pidana tidak ada yang menyangkal, bahwa si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana ini lebih nampak apabila dikemukakan, bahwa dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, dapat dikatakan si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya hukum pidana (*constitutief gevolg*).
- b. Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Jika ini terjadi, maka teori kehendak (*wilstheorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh pelaku, maka kini juga ada kesengajaan berupa tujuan (*oogmerk*) oleh karena dalam keduanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya banyangan atau gambaran dalam gagasan pelaku bahwa akibat pasti akan pasti terjadi, maka kini juga ada kesengajaan.

c. Sengaja sadar akan kemungkinan

Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai banyangan suatu kepastian akan terjadinya akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

Menurut Van Hattum dan Hazewinkel-Suringa (Amir Ilyas, 2012:82) mengatakan bahwa :

Tidak ada kesengajaan, melainkan hanya mungkin ada *culpa* atau kurang berhati-hati. Kalau masih ada dapat dikatakan, bahwa kesengajaan secara keinsafan kepastian praktis sama atau hampir sama dengan kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), maka sudah terang kesengajaan secara keinsafan kemungkinan tidaklah sama dengan dua macam kesengajaan yang lain itu, melainkan hanya disamakan atau dianggap seolah-olah sama.

2. Kealpaan (*Culpa*)

Dalam Undang-undang tidak ditemukan apa arti kelalaian atau kealpaan (*culpa*) tetapi dari ilmu pengetahuan hukum pidana diketahui sifat-sifat adalah ciri dari *culpa*.

Menurut Lamintang (1997:342), mengemukakan bahwa :

1. Sengaja melakukan tindakan yang ternyata salah, karena menggunakan ingatan/otaknya secara salah, seharusnya dia menggunakan ingatannya (sebaik-baiknya), tetapi dia melakukan suatu tindakan (aktif atau pasif) dengan kurang kewaspadaan yang diperlukan.

2. Pelaku dapat memperkirakan akibat yang terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya, sekiranya akibat itu pasti akan terjadi, dia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat itu. Tetapi tindakan itu tidak diurungkan, atas tindakan mana ia kemudian dicela, karena bersifat melawan hukum.

Menurut E.Y.Kanter (1982:92) mendefinisikan *culpa* sebagai berikut :

Kealpaan atau *culpa*, seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan, yang bentuknya lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan, karena bila mana dalam kesengajaan, suatu akibat yang timbul itu dikehendaki pelaku maka dalam kealpaan justru akibat itu tidak dikehendaki walaupun pelaku dapat memperkenalkan sebelumnya.

Menurut Wirjono Prodjodikoro (2003:42), mengemukakan bahwa :

Kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak sederajat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.

Menurut Simons (Leden Marpaung, 2005:25) mengemukakan bahwa :

Umumnya *culpa* itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga suatu perbuatan itu walaupun suatu perbuatan itu dilakukan dengan berhati-hati masih mungkin juga terjadi *culpa* jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang UU.

Dapat diduga akibat itu lebih dahulu oleh pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai *culpa*.

Menurut Jonkers (Rusli Effendy, 1980 : 65) mengemukakan bahwa :

culpa dalam hukum pidana diperlakukan lebih kurang satu kelalaian yang hebat, yang mengakibatkan perbuatan itu melawan hukum.

Menurut Langemeyer (Moeljatno, 2000: 200) mengemukakan bahwa:

Culpa adalah suatu struktur yang sangat gecompliceerd. Dia mengadukan dalam satupiak kekeliruan dalam suatu perbuatan lahir, dan menunjukkan kepada adanya keadaan batin yang tertentu dan dilain pihak keadaan itu sendiri.

Menurut Masruchir Ruba'I (2001 : 58) mengemukakan bahwa :

Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang tidak berupa kesengajaan, akan tetapi juga bukan sesuatu yang terjadi kebetulan.

Dalam kealpaan sikap batin seseorang menghendaki melakukan perbuatan akan tetapi sama sekali tidak menghendaki terjadinya akibat dari perbuatannya. Jadi dalam kealpaan tidak ada niat jahat dari petindak. Namun demikian kealpaan tetap ditetapkan sikap batin petindak yang memungkinkan pembedaan.

D. Lalu Lintas

1. Pengertian lalu lintas

Di dalam Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat UU LLAJ) didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas, sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang

dan/atau barang yang berupa jalan atau fasilitas pendukung. Operasi lalu lintas di jalan raya ada empat unsur yang saling terkait yaitu pengemudi, kendaraan, jalan, dan pejalan kaki.

Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus persimpangan.

2. Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut UU LLAJ, kecelakaan lalu lintas adalah “suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban dan/atau kerugian harta benda.

Menurut Pasal 229 UU LLAJ menentukan sebagai berikut :

- 1) Kecelakaan lalu lintas digolongkan atas :
 - a. kecelakaa lalu linta ringan;
 - b. kecelakaan lalu lintas sedang; atau
 - c. Kecelakaan lalu lintas berat.
- 2) Kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- 3) Kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- 4) Kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

- 5) Kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dimaksud pada Ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklayakan kendaraan, serta ketidaklayakan jalan dan/atau lingkungan.

3. Ketentuan Pidana Dapat Dijatuhkan Pada Kecelakaan Lalu Lintas

Dalam Pasal 229 UU LLAJ, kecelakaan lalu lintas digolongkan menjadi 3, yaitu:

- a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- b. Kecelakaan lalu lintas sedang, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- c. Kecelakaan lalu lintas berat, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Secara umum mengenai kewajiban dan tanggung jawab pengemudi, Pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau perusahaan angkutan ini diatur dalam Pasal 234 ayat (1) UU LLAJ yang berbunyi :

Pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang di derita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi.

Namun dalam Pasal 234 ayat (3) UU LLAJ ketentuan sebagaimana dimaksud di atas tidak berlaku jika :

- a. Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan pengemudi;
- b. Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/atau
- c. Disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Dalam Pasal 236 UU LLAJ pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas wajib:

Mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. Kewajiban mengganti kerugian ini dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai diantara para pihak yang terlibat.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa bentuk pertanggungjawaban atas kecelakaan lalu lintas yang hanya mengakibatkan kerugian materi tanpa korban jiwa adalah dalam bentuk penggantian kerugian.

Menurut S. R. Sianturi (2002:211), mengemukakan bahwa:

Dalam hal menentukan apakah kecelakaan yang mengakibatkan kerugian materi tanpa korban jiwa merupakan tindak pidana atau bukan, maka tindakan dinyatakan sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur:

- a) Subjek;
- b) Kesalahan;
- c) Bersifat melawan hukum (dari tindakan);
- d) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana;
- e) Waktu, tempat dan keadaan.

Jika dikaitkan dengan kecelakaan lalu lintas sebagaimana tersebut di atas, baik kecelakaan lalu lintas ringan, sedang maupun berat adalah termasuk tindak pidana. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 230 UU LLAJ yang berbunyi: "Perkara Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Jadi, didasarkan pada uraian di atas, maka pihak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian materi saja tanpa korban merupakan pelaku tindak pidana dan akan diproses secara pidana karena tindak pidananya.

Sanksi hukum yang dapat dikenakan atas kejadian tersebut di atas bagi pengemudi karena kelalaian adalah sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 310 ayat (1) UU LLAJ yang berbunyi :

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan /atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Sedangkan dalam hal mengemudi kendaraan bermotor dengan sengaja membahayakan kendaraan/barang, diatur dalam Pasal 311 ayat (2) UU LLAJ yang berbunyi:

- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Sedangkan perusahaan jasa angkutan umum, dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

- Pasal 188: "Perusahaan Angkutan Umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh Penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan."
- Pasal 191: "Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan

penyelenggaraan angkutan."

- Pasal 193

- (1) Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang, atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim.
- (2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak barang diangkut sampai barang diserahkan di tempat tujuan yang disepakati.
- (4) Perusahaan Angkutan Umum tidak bertanggung jawab jika kerugian disebabkan oleh pencantuman keterangan yang tidak sesuai dengan surat muatan angkutan barang.

Dalam Pasal 199 (1) UU LLAJ yang berbunyi :

Selain sanksi penggantian kerugian, perusahaan angkutan umum yang bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan dapat diberikan sanksi berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda administratif;
- c. Pembekuan izin; dan/atau
- d. Pencabutan izin.

Jadi, atas kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian materi namun tidak ada korban jiwa, perusahaan angkutan umum dapat dikenakan sanksi penggantian kerugian berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami sebagaimana telah kami uraikan di atas dan/atau sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Ketentuan Pidana Pada Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) :

- Pasal 310: Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan:
 1. Kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah).
 2. Korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 3. Korban luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dalam hal kecelakaan tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- Pasal 311: Setiap yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Dalam hal perbuatan mengakibatkan kecelakaan lain dengan :

1. Kerusakan kendaraan dan/atau barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).
2. Korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
3. Korban luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dalam hal kecelakaan tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta).

Dalam Bab XXI Kitab Undang-undang hukum pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) yang menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan terdaat pada pasal sebagai berikut:

- Pasal 359 KUHPidana: Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.
- Pasal 360 KUHPidana:
 - (1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.
 - (2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana kurungan paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling tinggi Rp. 4.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Mengenai tabrak lari, tabrak lari umumnya dengan pengertian bahwa pelaku atau dalam hal ini pengemudi kendaraan bermotor meninggalkan korban kecelakaan lalu lintas dan ketika itu tidak menghentikan kendaraan yang dikemudikan.

Pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 231 UU LLAJ wajib:

1. Menghentikan kendaraan yang dikemudikan.
2. Memberikan pertolongan kepada korban
3. Melaporkan kecelakaan kepada kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat; dan
4. Memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan.

Pengemudi kendaraan yang karena keadaan memaksa tidak dapat menghentikan kendaraan ataupun memberikan pertolongan

kepada korban ketika kecelakaan lain terjadi, keadaan memaksa dalam hal ini dimaksudkan bahwa situasi dilingkungan lokasi kecelakaan yang dapat mengancam keselamatan diri pengemudi, terutama dari amukan massa dan kondisi pengemudi yang tidak berdaya untuk memberikan pertolongan.

Terhadap hal tersebut maka pengemudi kendaraan bermotor segera melaporkan diri kepada kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat. Jika hal ini tidak juga dilakukan oleh pengemudi yang dimaksud maka berdasarkan Pasal 312 UU LLAJ dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,00 (jutuh puluh lima juta rupiah).

5. Jenis Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas

Bagi pelaku tindak pidana lalu lintas dapat dijatuhi pidana berupa pidana penjara, kurungan, atau denda dan selain itu dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan sura izin mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas.

E. Tindak Pidana Kealpaan yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain

1. Dasar Hukum Tindak Pidana Kealpaan

Ketentuan mengenai kelalaian atau kealpaan yang menyebabkan korban ya meninggal dunia diatur dalam KUH Pidana Buku Kedua tentang Kejahatan Bab XXI Pasal 359, yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau kurungan paling lama 1 (satu) tahun.”

Terdapat pula dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pasal 310, yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaian nya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaian nya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaian nya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

2. Unsur Delik Karena Kealpaan yang Menyebabkan Matinya Orang Lain

Unsur delik yang karena kelpaannya menyebabkan matinya orang lain dalam hal ini dirumuskan dalam Pasal 359 KUHP yang berbunyi : “Barang siapa karena kelapaannya menyebabkan

matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

Unsur-unsur dari rumusan Pasal 359 KUHP diatas yaitu :

- a. Barang siapa
Yang dimaksud dengan barang siapa adalah untuk menentukan siapa pelaku delik sebagai objek hukum yang telah melakukan delik tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya.
Dalam hal ini dimaksud dari pada subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggungjawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwa dari pelaku yang didakwakan dalam melakukan delik, yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai keadaan sadar.
- b. Karena kesalahannya (kelalaian atau kealpaan)
Dalam unsur ini adalah bahwa matinya korban apakah merupakan akibat dari kelakuan yang tidak dikehendaki oleh terdakwa (orang yang berbuat).
- c. Mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain
Dalam unsur ini, karena kelalaiannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain mati, maka unsur ini adalah untuk melihat hubungan antara perbuatan yang terjadi dengan akibat yang ditimbulkan sehingga rumusan ini menjadi syarat mutlak dalam delik ini adalah akibat.

Menurut Adami Chazawi (2002:125), mengemukakan bahwa :

Kalimat “menyebabkan orang mati” tidak berbeda dengan unsur perbuatan menghilangkan nyawa dari pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP. Perbedaanya dengan pembunuhan hanyalah terletak pada unsur kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati (*culpa*) sedangkan kesalahan dalam pembunuhan adalah kesengajaan.

F. Putusan

1. Pengertian Putusan

Perihal putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya putusan hakim berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah selanjutnya. Dalam sistem peradilan pidana modern seperti Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai kaidah hukum formil tidak diperkenankan main hakim sendiri.

Dalam Pasal (1) angka 11 KUHAP disebutkan bahwa putusan pengadilan sebagai: "Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini."

2. Jenis-Jenis Putusan

Dengan melakukan perumusan KUHAP, pada dasarnya putusan Hakim/Pengadilan dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu:

a. Putusan yang bukan putusan akhir

Pada praktik peradilan bentuk putusan awal dapat berupa penetapan dan putusan sela, putusan jenis ini mengacu pada ketentuan Pasal 148 dan 156 ayat 1 KUHAP, yakni

dalam hal setelah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa dan/atau penasehat hukum mengajukan Keberabatan atau Eksepsi terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pada hakekatnya putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa:

1. Penetapan yang menentukan bahwa tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara karena merupakan kewenangan Pengadilan Negeri yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 143 Ayat (1) KUHAP.
2. Putusan menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum. Karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP, dan dinyatakan batal demi hukum menurut ketentuan Pasal 143 Ayat (3) KUHAP.
3. Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa atau penuntut umum tidak dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 156 Ayat (1) KUHAP disebabkan materi perkara tersebut telah daluarsa, materi perkara hukum perdata dan sebagainya.

b. Putusan akhir

Putusan ini dalam praktik lazim disebut dengan istilah "*eind vonis*" dan merupakan jenis putusan ag bersifat materi. Putusan ini terjadi apabila setelah majelis hakim memeriksa terdakwa sampai dengan berkas pokok perkara selesai diperiksa secara teoritik putusan akhir ini dapat berupa:

1. Putusan bebas (Pasal 191 Ayat (1) KUHAP)

Putusan bebas menurut rumpun Eropa Continental, lazim disebut dengan "*vrijspraak*". Aturan hukum putusan bebas diatur dalam KUHAP Pasal 191 ayat (1) yaitu:

"jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas".

Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan "perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan" adalah tidak cukup bukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum pidana ini.

2. Putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan (Pasal 191 Ayat (1) KUHAP).

Secara umum putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yaitu:

"jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum."

Apabila dikonklusikan dan dijabarkan lebih lanjut secara teoritik pada ketentuan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP terhadap pelepasan dari segala tuntutan terjadi jika :

- 1) Dari hasil pemeriksaan didepan sidang pengadilan perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana.
- 2) Karena adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar
- 3) Melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah yang diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu.

c. Putusan Pemidanaan (Pasal 193 Ayat (1) KUHAP)

Pada dasarnya putusan pemidanaan diatur oleh ketentuan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP yaitu :

"jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana".

G. Pertimbangan Hakim Dalam dalam Memutuskan Perkara

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih

dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.

Menurut Lilik Mulyadi (2007:193) mengemukakan bahwa:

“Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik, apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum/dictum putusan hakim.”

Menurut Rusli Muhammad (2007:212) mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni:

Pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya Dakwaan Jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa.

Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi, waktu kejadian, dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan. Selain itu, dapat pula diperhatikan bagaimana akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa saja yang digunakan, serta apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak.

Apabila fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang

didakwakan oleh penuntut umum. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, Yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendiriannya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putusan hakim, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa.

2. Pertimbangan Sosiologis

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) yang mengemukakan bahwa:

Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Jadi, hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Oleh karena itu, ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Berkaitan dengan hal ini dikemukakan oleh Achmad Ali (2009:200) mengemukakan bahwa:

Dikalangan praktisi hukum, terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan normative, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum (nomatif).

Menurut Bismar Siregar (1989: 33) mengemukakan bahwa:

Seandainya terjadi dan akan terjadi benturan bunyi hukum antara yang dirasakan adil oleh masyarakat dengan apa yang disebut kepastian hukum, jangan hendaknya kepastian hukum dipaksakan dan rasa keadilan masyarakat dikorbankan.

Menurut HB Sutopo (2002: 68) mengemukakan bahwa:

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, antara lain:

- a. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini diadakan penelitian di Makassar yaitu di Pengadilan Negeri Makassar.

B. Jenis dan Sumber Data

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan jenis data sebagai berikut :

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui teknik wawancara dengan responden. Data jenis ini diperoleh dari sumber data yang merupakan responden penelitian yaitu Hakim di Pengadilan Negeri Makassar

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data tidak langsung yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Sumber data dalam hal ini yaitu sebagai berikut :

- a) Dokumen-dokumen resmi, arsip-arsip yang terdapat di lokasi penelitian (Pengadilan Negeri Makassar).
- b) Literatur, perundang-undangan, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, artikel-artikel dalam media cetak serta media massa lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Wawancara atau *interview* yaitu proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Dalam proses *interview* terdapat dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda, satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau penanya atau disebut *interviewer* sedang pihak yang lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan atau responden. Pada penelitian yang dilakukan ini, penulis atau peneliti berkedudukan sebagai interviewer dan responden adalah Hakim di Pengadilan Negeri Makassar.

Teknik wawancara yang dipakai bersifat bebas terpimpin yaitu wawancara dilakukan dengan menggunakan *interview guide* yang berupa catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan, sehingga dalam hal ini masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika *interview* dilakukan.

- 2) Studi kepustakaan yaitu mendapatkan data melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku literatur, catatan kuliah, surat kabar, dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat.

D. Teknik Analisis Data

Data penelitian ini dianalisa dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu berusaha menganalisa data dengan menguraikan dan memaparkan secara jelas dan apa adanya mengenai obyek yang diteliti. Data-data dan informasi yang diperoleh dari obyek penelitian dikaji dan dianalisa, dikaitkan dengan teori dan peraturan yang berlaku yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat.

^BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Dalam Putusan Nomor 181/Pid.B/2015/PN.Mks.

1. Posisi Kasus

Pada awalnya terdakwa ROBBY HOSEA pada hari minggu tanggal 30 Nopember 2014 sekitar jam 05.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2014, bertempat dijalan Jend. M. Yusuf Makassar (eks jalan Gunung Bulusaraung Makassar) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam hukum Pengadilan Negeri Makassar, yang melakukan kelalaian lalu lintas yang menyebabkan JEFERY JAURY meninggal dunia. Awal mula kejadian tersebut pada waktu ketika ROBBY HOSEA dari Discotik Retro Hotel Clarion Makassar hendak pulang kerumahnya dengan mengendarai mobil Nissan Grand Livina Warna Putih dengan nomor Polisi DD 1074 XJ dimana saat melintas di jalan Jend. M. Yusuf Makassar terdakwa tertidur sehingga mobil yang dikendarai terdakwa naik keatas trotoar sebelah kiri jalan yang kemudian mobil terdakwa tersebut menabrak korban JEFFRY JAURY yang sedang berjalan diatas trotoar jalan tersebut hingga korban JEFFRY JAURY terlempar sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat tabrakan tersebut lalu mobil yang dikemudikan terdakwa

tersebut kembali menabrak gapura jalan dan mobil yang sedang terparkir di lokasi tersebut hingga mobil yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut terbalik.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Adapun isi dakwaan Penuntut Umum terhadap tindak pidana kelalaian lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa ROBBY HOSEA yang dibacakan pada persidangan dihadapan Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa ROBBY HOSEA pada hari minggu tanggal 30 Nopember 2014 sekitar jam 05.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2014, bertempat di jalan Jend.M. Yusuf Makassar (eks jalan Gunung Bulusaraung Makassar) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam hukum Pengadilan Negeri Makassar, Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula terdakwa dari Discotik Retro Hotel Clarion Makassar hendak pulang kerumahnya dengan mengendarai mobil Nissan Grand Livina Warna Putih dengan nomor Polisi DD 1074 XJ dimana saat melintas di jalan Jend. M. Yusuf Makassar terdakwa tertidur sehingga mobil yang dikendarai terdakwa naik keatas trotoar sebelah kiri jalan yang kemudian mobil terdakwa tersebut menabrak korban JEFFRY JAURY yang sedang berjalan diatas trotoar jalan tersebut hingga korban JEFFRY JAURY terlempar sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat tabrakan tersebut lalu mobil yang dikemudikan terdakwa tersebut kembali menabrak gapura jalan dan mobil yang sedang terparkir di lokasi tersebut hingga mobil yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut terbalik.

- Bahwa terdakwa mengendarai mobilnya tersebut dalam keadaan kehilangan kesadaran dan konsentrasi yang disebabkan terdakwa sebelum mengendarai kendaraan tersebut terdakwa mengkonsumsi minuman beralkohol dan obat narkotika jenis ekstasi hal ini sesuai dengan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : Lab-2100/NNF/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa urine dan darah milik terdakwa mengandung MDMA (–+)-N-a-dimestil-3,4 (Metilendioksi) yang mana MDMA (–+)-N-a-dimestil-3,4 (metilendioksi) terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 37 lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban JEFFRY JAURY meninggal dunia di lokasi tersebut dimana dari hasil pemeriksaan terhadap korban JEFFRY JAURY oleh Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar sesuai dengan hasil et repertum nomor : ver/001-Mt/XII/2014/Forensik-Dokpol tanggal 01 Desember 2014 ditemukan :
 - Terdapat luka terbuka di kepala bagian kiri dengan ukuran 5 cm x 0,5 cm.
 - Terdapat luka robek di daun telinga kanan dengan ukuran 2 cm x 3 cm.
 - Terdapat luka gores lecet disertai memar kemerahan di wajah :
 - a. Pipi kanan ukuran 10 cm x 5 cm.
 - b. Pipi kiri ukuran panjang 9 cm.
 - c. Dahi ke pelipis ukuran 8x4 cm.
 - d. Hidung ukuran panjang 2,5 cm.
 - Terdapat luka robek di kelopak mata kanan dengan ukuran 3 cm x 0,5 cm.
 - Terdapat luka lecet dan gores di bahu kiri dengan ukuran 7 cm x 5 cm.
 - Terdapat luka gores di siku kiri.
 - Terdapat luka gores di punggung tangan kiri.
 - Terdapat luka gores di bahu kanan.
 - Terdapat luka gores di lengan kanan.
 - Tampak lengan bawah tangan kanan patah (fraktur).
 - Terdapat luka gores di punggung tangan dan jari-jari tangan kanan.
 - Teraba tulang kepala tengkorak belakang retak.

Dengan kesimpulan : Tampak luka terbuka pada kepala bagian kiri, dapat sesuai akibat benturan benda tumpul (akibat

kecelakaan lalu lintas), penyebab kematian langsung korban yaitu adanya pendarahan otak akibat cidera kepala berat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 311 ayat (5) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa ROBBY HOSEA pada hari minggu tanggal 30 Nopember 2014 sekitar jam 05.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2014, bertempat dijalan Jend.M. Yusuf Makassar (eks jalan Gunung Bulusaraung Makassar) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam hukum Pengadilan Negeri Makassar, Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara -cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula terdakwa dari Discotik Retro Hotel Clarion Makassar hendak pulang kerumahnya dengan mengendarai mobil Nissan Grand Livina Warna Putih dengan nomor Polisi DD 1074 XJ dimana saat melintas di jalan Jend. M. Yusuf Makassar terdakwa tertidur sehingga mobil yang dikendarai terdakwa naik keatas trotoar sebelah kiri jalan yang kemudian mobil terdakwa tersebut menabrak korban JEFFRY JAURY yang sedang berjalan diatas trtoar jalan tersebut hingga korban JEFFRY JAURY terlempar sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat tabrakan tersebut lalu mobil yang dikemudian terdakwa tersebut kembali menabrak gapura jalan dan mobil yang sedang terparkir di lokasi tersebut hingga mobil yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut terbalik.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban JEFFRY JAURY meninggal dunia di lokasi tersebut dimana dari hasil pemeriksaan terhadap korban JEFFRY JAURY oleh Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar sesuai dengan hasil et repertum nomor : ver/001-Mt/XII/2014/Forensik-Dokpol tanggal 01 Desember 2014 ditemukan :
 - Terdapat luka terbuka dikepala bagian kiri dengan ukuran 5 cm x 0,5 cm.
 - Terdapat luka robek didaun telinga kanan dengan ukuran 2 cm x 3 cm.

- Terdapat luka gores lecet disertai memar kemerahan diwajah :
 - a. Pipi kanan ukuran 10 cm x 5 cm.
 - b. Pipi kiri ukuran panjang 9 cm.
 - c. Dahi ke pelipis ukuran 8x4 cm.
 - d. Hidung ukuran panjang 2,5 cm.
- Terdapat luka robek dikelopak mata kanan dengan ukuran 3 cm x 0,5 cm.
- Terdapat luka lecet dan gores dibahu kiri dengan ukuran 7 cm x 5 cm.
- Terdapat luka gores disiku kiri.
- Terdapat luka gores dipunggung tangan kiri.
- Terdapat luka gores dibahu kanan.
- Terdapat luka gores dilengan kanan.
- Tampak lengan bawah tangan kanan patah (fraktur).
- Terdapat luka gores dipunggung tangan dan jari-jari tangan kanan.
- Teraba tulang kepala tengkorak belakang retak.

Dengan kesimpulan : Tampak luka terbuka pada kepala bagian kiri, dapat sesuai akibat benturan benda tumpul (akibat kecelakaan lalu lintas), penyebab kematian langsung korban yaitu adanya pendarahan otak akibat cedera kepala berat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan beberapa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti untuk memperkuat dakwaannya, sebagai berikut :

a. Keterangan Saksi-saksi

1. Saksi Jie Heang Tjie

Di depan persidangan keterangannya diberikan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan suami saksi yang bernama JEFFRY JAURY ditabrak oleh pengendara mobil.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 30 Nopember 2014 sekitar jam 05.30 wita bertempat di jalan Muh. Yusuf (eks jalan Gunung Bulu Saraung) Makassar.
- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui pengendara mobil yang menabrak suami saksi tersebut, nanti beberapa hari setelah kejadian baru saksi mengetahui bahwa yang menabrak suami saksi tersebut adalah ROBBY HOSEA..
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika saksi dan suami saksi keluar dari rumah saksi di jalan Tentara pelajar untuk jalan pagi dimana saat itu saksi bersama suami saksi melewati jalan sulawesi kemudian belok kiri ke jalan ahmad yani hingga terus kelajuan Muh Yusuf (eks jalan Gunung Bawakaraeng) dan saat berada di jalan MUH YUSUF tiba tiba saksi mendengar suara benturan dan seketika itu saksi melihat suami saksi terlempar ke atas dan terjatuh sekitar 10 meter dari posisi saksi.
- Bahwa benar sebelum saksi mendengar suara benturan tersebut saksi jalan berdampingan dengan suami saksi di atas trotoar jalan sebelah kiri jalan dimana saat itu saksi berada disamping kiri suami saksi.
- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui penyebab suami saksi terlempar ke atas nanti setelah kejadian baru saksi mengetahui kalau suami saksi di tabrak oleh sebuah mobil warna putih dimana saat itu saksi melihat mobil tersebut dalam keadaan terbalik di atas trotoar jalan
- Bahwa benar setelah menabrak suami saksi mobil tersebut juga menabrak gapura jalan yang ada di sekitar jalan tersebut yang kemudian menabrak mobil yang sedang terparkir di depan ruko
- Bahwa benar setelah itu saksi menghampiri suami saksi di mana saat itu saksi dalam keadaan terkurap di atas trotoar jalan dan saat itu suami saksi sudah tidak bergerak dan keluar darah dari telinganya yang kemudian suami saksi dibawa oleh anggota kepolisian ke rumah sakit namun saat itu suami saksi sudah meninggal.

- Bahwa benar atas kejadian tersebut suami saksi meninggal dunia dan suami saksi telah dikebumikan pada hari rabu tanggal 03 Desember 2014 sekitar jam 13.00 wita dipemakaman umum warga tionghoa Bollangi kab.Gowa.
- Bahwa benar saat kejadian tersebut di tempat kejadian saksi tidak memperhatikan pengendara mobil tersebut karena saksi hanya memperhatikan suami saksi yang tidak bergerak lagi diatas trotoar.
- Bahwa benar sebelum adanya suara benturan tersebut saksi tidak pernah mendengar suara bunyi klakson maupun bunyi rem dari mobil yang menabrak suami saksi tersebut.
- Bahwa benar atas kejadian tersebut, terdakwa maupun keluarganya tidak pernah memberikan santunan kepada keluarga saksi atas kejadian tersebut.
- Bahwa benar foto mobil yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar mobil tersebut yang menabrak suami saksi yang mana setelah menabrak suami saksi mobil tersebut terbalik diatas trotoar jalan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Irfan Amir, S.E.

Didepan persidangan keterangannya diberikan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari minggu tanggal 30 Nopember 2014 sekitar jam 05.30 wita bertempat di jalan Muh Yusuf (eks jalan Gunung Bulu Saraung) Makassar.
- Bahwa benar yang terlibat kecelakaan lalu lintas saat itu adalah Grand Livina warna putih dengan dengan nomor polisi DD 1074 XJ menabrak mobil milik saksi yang sedang terparkir di atas trotoar jalan.
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut saksi sedang tidur didalam rumah yang kemudian saksi dibangunkan oleh sepupu saksi yang menyampaikan bahwa mobil saksi yang terparkir didepan rumah (ruko) ditabrak oleh mobil sehingga saat itu saksi langsung keluar dan melihat mobil saksi sudah dalam keadaan rusak pada bagian depan dan di dekat mobil saksi mobil grand livina warna putih dalam keadaan terbalik.

- Bahwa benar sebelum mobil grand livina tersebut menabrak mobil saksi, mobil tersebut dahulu menabrak seorang laki-laki tua yang saksi tidak dikenal namanya dan sebuah gapura jalan yang berada didekat rumah saksi tersebut.
- Bahwa benar saat saksi keluar pengendara mobil grand livina tersebut sudah tidak ada didalam mobilnya.
- Bahwa benar saat saksi keluar saksi melihat seorang laki-laki sedang dalam keadaan tengkurap diatas trotar jalan dimana laki-laki tersebut keluar darah dari telinganya dan luka patah pada bagian tangan dan orang tersebut sudah tidak bergerak yang tidak lama kemudian orang tersebut dibawa oleh anggota kepolisian yang datang kelokasi tersebut kerumah sakit.
- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui pengendara mobil grand livina tersebut nanti dikantor polisi baru saksi mengetahui bahwa pengendara mobil tersebut bernama ROBBY HOSEA.
- Bahwa benar kondisi jalan ditempat kejadian tersebut saat itu masih sunyi dari pengendaraan kendaraan karena masih pagi-pagi dan jalan lokasi tersebut sangat luas yang lebar jalan sekitar 6-8 meter.
- Bahwa benar mobil saksi yang ditabrak tersebut berada di atas trotoar jalan sebelah kiri tepatnya di depan ruko milik saksi.
- Bahwa benar atas kejadian tersebut seorang laki-laki tua meninggal dilokasi tersebut dan mobil saksi dalam keadaan rusak dimana mobil saksi tersebut saksi perbaiki yang memakan biaya sebesar Rp. 12.500.000,-.
- Bahwa benar atas kerusakan mobil saksi tersebut telah diperbaiki oleh keluarga terdakwa.
- Bahwa benar foto mobil grand livina yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar mobil tersebut yang saksi lihat terbalik didekat mobil saksi pada kejadian kecelakaan tersebut terjadi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Sander Njan.

Keterangannya pada saat penyidikan diberikan dibawa sumpah yang mana keterangannya tersebut dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh teman saksi yang bernama ROBBY HOSEA.
 - Bahwa benar pada saat kecelakaan tersebut terjadi saksi berada dirumah saksi dimana saksi mengetahui kalau ROBBY HOSEA kecelakaan dari teman FERL yang menyampaikan pada hari mininggu pagi tanggal 30 Nopember 2014 sekitar jam 08.00 wita.
 - Bahwa benar yang saksi ketahui kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh ROBBY HOSEA terjadi pada Minggu tanggal 30 Nopember 2014 sekitar jam 05.00 wita di jalan jend. Muh. Yusuf (eks jalan gunung bulusaraung) makassar makassar dimana kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas yaitu sebuah mobil nissan grand livina warna putih yang dikemudikan oleh ROBBY HOSEA menabrak yang mengakibatkan adanya korban yang meninggal.
 - Bahwa benar sebelum kejadian tersebut saksi bersama dengan ROBBY HOSEA di diskotik Retro Clarion Makassar.
 - Bahwa benar saksi bertemu dengan ROBBY HOSEA di diskotik retro jam 23.30 wita.
 - Bahwa benar saat di diskotik tersebut saksi bersama ROBBY HOSEA dan teman-teman saksi lainnya mengkonsumsi minuman beralkohol jenis gold lebel sebanyak 2 (dua) botol dan bir putih sebanyak 2 (dua) picher.
 - Bahwa benar saat berada di diskotik tersebut saksi tidak melihat ROBBY HOSEA mengkonsumsi obat-obatan.
 - Bahwa benar ROBBY HOSEA pulang dari diskotik retro bersama dengan saksi dan ANDI menggunakan mobil nissan grand livina warna putih milik ROBBY HOSEA yang kemudian saat itu mengantar ANDI kerumahnya di jalan Veteran Utara selanjutnya mengantar saksi ke jalan Renggong lalu ROBBY HOSEA menuju pulang kerumahnya.
 - Bahwa benar saat ROBBY HOSEA mengantar saksi pulang saat itu saksi melihat kondisi ROBBY HOSEA dalam keadaan mengantuk.
 - Bahwa benar foto mobil dan foto ROBBY HOSEA adalah benar foto tersebut adalah foto ROBBY HOSEA sedangkan mobil tersebut mobil milik ROBBY HOSEA.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

b. Keterangan Ahli

1. Ahli Kumpul Faizal Rachmad, S.T.

Pendapatnya pada saat penyidikan dibacakan di depan persidangan, pendapatnya tersebut dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa benar riwayat pendidikan ahli yakni strata satu (S-1) jurusan teknik kimia di institute Teknologi sepuluh Nopember Surabaya (ITS) dan tamat pendidikan pada tahun 2001, kemudian ahli masuk sekolah perwira Polri PPSS (perwira Polri sumber sarjana) dan tamat pada tahun 2003 yang kemudian ditempatkan di laboratorium Polri Cabang Makassar sebagai Perwira Pratama, pada tahun 2004 diangkat menjadi Laboran Pratama II Unit Kimbiofor di Laboratorium Polri Cabang Makassar pada tahun 2006 diangkat menjadi Laboran Pratama I Unit Kimbiofor di Laboratorium Polri Cabang Makassar, pada tahun 2007 diangkat menjadi Paur Dal dan pada tahun 2008 diangkat menjadi Laboran Pratama I Unit Kimbiofor, pada tahun 2011 diangkat menjadi Paur Subbid Narkobafor di Laboratorium Polri Cabang Makassar dan pada tahun 2013 diangkat menjadi Kaur Subbid Kimbiofor di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sampai sekarang.
- Bahwa benar ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) gelas piala berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik ROBBY HOSEA dimana hasil pemeriksaan ahli telah ahli serahkan kepada pemeriksa Unit Iaka Lantas Polrestabes Makassar.
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan urine dan darah milik ROBBY HOSEA disimpulkan bahwa urine dan darah milik ROBBY HOSEA mengandung MDMA (-+)-N-a-dimestil-3,4 (Metilendioksi) yang mana MDMA (-+)-N-a-dimestil-3,4 (Metilendioksi) terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 lampiran undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana dari hasil laboratorium tersebut ahli jelaskan sebagai berikut :
 - a. MDMA (-+)-N-a-dimestil-3,4 (Metilendioksi) adalah senyawa padat yang berasal dari bukan tanaman, turunan dari amfetamina, yang dapat menimbulkan efek psikoaktif yaitu :
 - 1. Dosis kecil menimbulkan perangsangan sentral yang nyata.
 - 2. Dosis lebih besar menimbulkan perangsangan sentral yang nyata.

3. Lebih besar lagi menimbulkan depresi miokard keracunan yang hebat, berakhir dengan konvulsi, koma dan kematian.

Pengaruh bagi pengendara kendaraan adalah dapat mengakibatkan kehilangan kesadaran dan konsentrasi sehingga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain pada saat mengemudikan kendaraan.

b. Alkohol merupakan senyawa cair yang bersifat depresan yang menekan kinerja system syaraf pusat. Alkohol dapat mempengaruhi system syaraf dengan menghambat distribusi sinyal antara syaraf tulang belakang dengan otak, akibatnya koordinasi tubuh seseorang menjadi tumpul, sehingga mengakibatkan konsentrasi dan perilaku yang tidak terkontrol. Pada saat mengkonsumsi konsentrasi tinggi dapat menyebabkan kesulitan dan kegagalan bernafas, muntah, tidak sadar, menyebabkan koma dan kematian.

Pengaruh bagi pengendara kendaraan adalah dapat menyebabkan kehilangan kesadaran, tremor, panic, kecemasan, mual, gangguan penglihatan, kebingungan dan kehilangan konsentrasi sehingga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain pada saat mengemudikan kendaraan.

- Bahwa benar lamanya pengaruh terhadap mengkonsumsi MDMA (ekstasi) adalah 1-3 hari tergantung pada kemampuan metabolisme tubuh dan jumlah senyawa MDMA (ekstasi) yang dikonsumsi seseorang.
- Bahwa benar Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab.2100/NNF/XII/2014 adalah benar berita acara pemeriksaan tersebut terhadap urin dan darah milik ROBBY HOSEA dan ahli ikut bertanda tangan dalam berita acara tersebut

Atas pendapat ahli tersebut terdakwa tidak menanggapi.

c. Alat Bukti Surat

Alat bukti surat yang terdapat dalam berkas perkara berupa :

1. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar nomor : Ver/001-Mt/XII/2014/Forensik-Dokpol tanggal 01 Desember 2014

2. Surat keterangan meninggal dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Nomor B/14/XI/2014/Rumkit tanggal 30 Nopember 2014.
3. Berita Acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. Lab.2100/NNF/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014.

d. Petunjuk.

Berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat 1 dan 2 KUHP dinyatakan petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiaannya baik diantara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya, petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dimana dari fakta yang terungkap dipersidangan justru mempertegas bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan oleh keterangan saksi-saksi dan diperkuat oleh keterangan terdakwa sebagaimana tersebut diatas.

e. Keterangan Terdakwa

Terdakwa Robby Hosea

Didepan persidangan yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang terdakwa alami.
- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas yang terdakwa maksud tersebut yakni mobil yang terdakwa kendaraai menabrak pejalan kaki kemudian menabrak gapura jalan lalu menabrak mobil yang sedang parkir yang kemudian mobil yang terkendaraai tersebut terbalik.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 30 Nopember 2014 sekitar jam 05.30 wita bertempat di jalan Jend. Muh. Yusuf (eks jalan Gunung Bulusaraung) Makassar.
- Bahwa benar saat terdakwa itu mengendaraai mobil merk Grand Livina warna Putih dengan nomor Polisi DD 1074 XJ.
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal pada hari sabtu tanggal 29 Nopember sekitar jam 22.30 wita terdakwa keluar rumah menuju ke diskotik Retro yang berada di Hotel Clarion Makassar dimana saat berada ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan teman-teman terdakwa sekitar 10 orang dan ditempat tersebut terdakwa mengkonsumsi minuman beralkohol jenis Gold label sebanyak 2 botol dan bir putih

sebanyak 2 picher dimana saat ditempat tersebut terdakwa minum sampai 05.00 wita lalu sekitar jam 05.00 wita terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama ANDI dan SANDER meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai mobil grand livina milik terdakwa kemudian mengantar ANDI kejalan Veteran lalu mengantar SANDER kejalan Ranggong selanjutnya terdakwa hendak pulang kerumahnya dengan melewati jalan Jend. Ahmad Yani dan pada saat itu berada di perempatan lampu merah jalan Ahmad Yani menuju kejalan Muh. Yusuf saat itu terdakwa sudah tertidur dan nanti tersadar ketika mobil terdakwa sudah terbalik diatas trotoar sebelah kiri jalan Muh. Yusuf (eks jalan Gunung Bulusaraung), dan saat mobil terdakwa tersebut terbalik kemudian terdakwa keluar dari dalam mobil yang kemudian terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian yang berada ditempat tersebut.

- Bahwa benar awalnya terdakwa tidak mengetahui apa-apa saja yang terdakwa tabrak nanti setelah kejadian baru terdakwa mengetahui bahwa mobil yang terdakwa kemudikan sebelum terbalik menabrak pejalan kaki yang berada di atas trotoar lalu menabrak gapura jalan kemudian menabrak mobil yang sedang terparkir diatas trotoar hingga mobil terdakwa terbalik.
- Bahwa benar saat terdakwa keluar dari dalam mobil saat itu terdakwa tidak memperhatikan pejalan kaki yang terdakwa tabrak tesebut.
- Bahwa benar pada saat di diskotik terdakwa hanya mengkonsumsi minuman beralkohol tidak mengkonsumsi obat-obat narkotika
- Bahwa benar terdakwa sekitar 3(tiga) haru sebelum kejadian tersebut terdakwa pernah mengkonsumsi obat jenis inex.
- Bahwa benar sehari sebelum kejadian terssebut terdakwa juga kurang tidur dimana terdakwa tidur jam 02.00 wita dan bangun jam 08.00 wita.
- Bahwa benar terdakwa saat itu memaksakan diri untuk pulang kerumah karena terdakwa hendak kerja.
- Bahwa benar saat itu terdakwa dalam keadaan mengantuk dan terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol.
- Bahwa benar terdakwa sadar bahwa dengan pengaruh alkohol dan pengaruh obat narkotika yang kemudian mengemudikan kendaraan dapat membahayakan orang lain.
- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa pejalan kaki yang terdakwa tabrak saat itu meninggal ditempat kejadian tersebut hal tersebut terdakwa ketahui dari penyampaia anggota kepolisian.

- Bahwa benar memang sebelumnya terdakwa sering ke diskotik bersama dengan teman-teman terdakwa.
- Bahwa benar foto mobil yang diperlihatkan kepada terdakwa adalah benar mobil tersebut milik terdakwa yang saat itu terdakwa kemudikan.
- Bahwa benar terdakwa maupun keluarga terdakwa tidak memberikan santunan apapun terhadap keluarga korban atas kejadian tersebut.

f. Barang Bukti

Barang bukti yang diajukan didepan persidangan berupa :

- 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina No. Reg. DD 1074 XJ.
- 1 (satu) STNK asli mobil Nissan Grand Livina No. Reg. DD 1074 XJ.
- 1 (satu) lembar SIM Gol. A an. ROBBY (sudah habis masa berlakunya).

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat memperkuat pembuktian.

Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Kesimpulan :

Dari hasil penyidikan serta berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan dalam Pasal 311 ayat (5) UU RI No. 22 tahun 2009.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan No. Reg. Perkara : PDM-84/MKS/Ep/01/2015 pada hari Senin, Tanggal 16 Maret 2015, maka Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar :

MENUNTUT

Supaya kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ROBBY HOSEA, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (5) UU RI No. 22 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROBBY HOSEA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dirutan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Niissaan Grand Livina No. Reg . DD 1074 XJ.
 - 1 (satu) lembar STNK asli mobil Nissan Grand Livina No. Reg. DD1074 XJ.
 - 1 (satu) lembar SIM A an. ROBBY (sudah habis masa berlakunya)Dikembalikan kepada terdakwa ROBBY HOSEA.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

4. Amar Putusan

Adapun yang menjadi amar putusan dalam perkara Nomor :

181/Pid.B/2015/PN.Mks ini sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Robby Hosea tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Nissn Grand Livina No. Reg. DD 1074 XJ.
- 1 (lembar) STNK asli mobil Nissan Grand Livina No. Reg. DD 1074 XJ.
- 1 (satu) lembar SIM Gol. A. An. Robby (sudah habis masa berlakunya).

Dikembalikan kepada terdakwa Robby Hosea.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

5. Analisis Penulis

Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana berusaha mencari kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta berpegang teguh pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan penuntut umum.

Dalam kasus yang penulis bahas ini dipergunakan dakwaan alternatif, sebab dalam perbuatan pelaku ada beberapa pasal yang dipersangkakan guna menjerat pelaku agar tidak ada celah bagi pelaku untu bebas dari perbuatannya. Dalam dakwaan yang dijatuhkan kepada terdakwa yaitu dakwaan kesatu Pasal 311 ayat (5) UU RI No. 22 Tahun 2009 lebih tepat dibandingkan dengan dakwaan kedua Pasal 301 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009, dimana jaksa telah mempertimbangkan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.” dalam Pasal 311 ayat (5) UU RI No. 22 Tahun 2009. Pada pasal tersebut telah mencocoki semua unsur-unsur

dalam ketentuan pasal tersebut dimana terdakwa memang benar mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Dengan demikian penerapan Pasal 311 ayat (5) UU RI No. 22 Tahun 2009 telah sesuai dan terhadap terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Berdasarkan posisi kasus, maka dapat disimpulkan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum telah sesuai dengan ketentuan, baik tindak pidana formil maupun tindak pidana materil dan syarat yang dapat dipidananya seorang terdakwa, hal ini didasarkan pada pemeriksaan persidangan, dimana alat bukti yang diajukan jaksa penuntut umum, termasuk didalamnya keterangan saksi yang saling bersesuaian ditambah keterangan terdakwa yang mengakui secara jujur perbuatan yang dilakukannya olehnya itu, Majelis Hakim Pengadilan Makassar menyatakan bahwa unsur perbuatan terdakwa telah mencocoki rumusan delik yang terdapat dalam Pasal 311 ayat (5) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Adapun unsur-unsur tindak pidana kelalaian yang diatur dalam Pasal 311 ayat (5) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut :

- Setiap orang;

- Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang;
- Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Apabila kita membahas satu persatu dari setiap unsur diatas yang dimaksud “setiap orang” disini adalah siapa saja yang orang atau subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah Robby Hosea sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Maka unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum.

Unsur “dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang mebahayakan bagi nyawa orang atau barang”. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan jika dihubungkan dengan gradasi atau corak kesengajaan maka dapat disimpulkan bahwa walaupun perbuatan terdakwa tidak menghendaki kematian dari korban tetapi terdakwa menyadari kemungkinan yang akan terjadi jika terdakwa mengemudikan kendaraan dalam kondisi mengantuk dan dalam keadaan terpengaruh minuman beralkohol serta obat-obat

narkotika dapat membahayakan bagi orang lain sehingga perbuatan terdakwa tersebut tergolong dalam kesengajaan sebagai kemungkinan atau *dolus eventualis*. Maka unsur “dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Unsur “yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa akibat terdakwa yang mengemudikan kendaraan dalam keadaan mengantuk dan pengaruh alkohol serta obat-obatan narkotika hingga mobil yang dikemudikan terdakwa menabrak korban Jefry Jaury yang sedang berjalan diatas trotoar jalan yang mengakibatkan korban Jefry Jaury meninggal dunia di lokasi tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan terhadap korban Jefry Jaury oleh dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar sesuai Visum et Repertum Nomor : Ver/001-Mt/XII/2014/Forensik-Dokpol tanggal 01 Desember 2014 serta Surat Keterangan Meninggal dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Nomor : B/14/XI/2014/Rumkit tanggal 30 November 2014. Maka unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan yakni Pasal 311 ayat (5) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh karena itu kepada terdakwa wajar dan patut diberi ganjaran yang setimpal dengan perbuatannya. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (5) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap terdakwa Robby Hosea, menurut hemat penulis sudah tepat sebab perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana kelalaian lalu lintas Pasal 311 ayat (5) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

B. Pertimbangan Hukum Oleh Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Berupa Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Dalam Putusan Nomor 181/Pid.B/2015/PN.Mks.

1. Perimbangan Hakim

Dalam perkara No. 181/Pid/B/2015/PN.Mks dalam hal ini terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dimana terdakwa melanggar ketentuan Pasal 311 ayat (5) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Tindakan yang dilakukan terdakwa oleh hakim harus dibuktikan dengan mengkaji unsur-unsur dari Pasal tersebut kemudian disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta alat bukti dengan menganalisisnya.

Adapun unsur-unsur dari Pasal 311 ayat (5) UU RI No. 22 Tahun 2009 berdasarkan isinya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang;
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi atau tidak Pasal 311 ayat (5) UU RI No. 22 Tahun 2009 tersebut yaitu sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Bahwa pengertian “setiap orang” disini adalah siapa saja orang atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa terdakwa ROBBY HOSEA yang dihadapkan dipersidangan ini dengan saksi, alat bukti, surat, barang bukti berupa SIM A dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan

identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah ROBBY HOSEA sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah menurut *memorie van Toeliching* adalah *Willen en Wetten*, artinya terdakwa menyadari atau menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, sedangkan gradasi/ corak kesengajaan sendiri terdiri dari 3 yakni :

1. Kesengajaan sebagai maksud yakni terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (Yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari perilaku. Dalam delik materil misalnya menghilangkan jiwa orang seperti tersebut pada Pasal 338 KUHP, matinya seseorang tersebut adalah merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan dari pelaku, kesengajaan perilaku termasuk dalam gradasi kesengajaan sebagai maksud.
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan. Pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan dan kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/ harus terjadi.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan atau Dolus Eventualis. Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi, termasuk pula dalam kesengajaan ini adalah kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat tertentu.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, petunjuk, alat bukti surat, keterangan terdakwa serta dihbungkan dengan barang bukti diperoleh suatu fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Nopember 2014 sekitar jam 05.30 wita bertempat di jalan Jend. Muh Yusuf (eks jalan Gunung Bulusaraung Makassar) berawal ketika terdakwa dari diskotik Retro Hotel Clarion Makassar hendak pulang kerumahnya dengan mengendari mobil Nissan Grand Livina Warna Putih dengan nomor Polisi DD 1074 XJ dimana saat melintas di jalan Jend. Muh. Yusuf Makassar terdakwa tertidur sehingga mobil yang dikendarai terdakwa naik keatas trotoar sebelah kiri jalan yang kemudian mobil terdakwa tersebut menabrak korban JEFFRY JAURY yang sedang berjalan diatas trotoar jalan tersebut hingga korban JEFFRY JAURY terlempar sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat tabrakan tersebut lalu mobil yang dikemudikan terdakwa tersebut kembali menabrak gapura jalan dan mobil yang sedang terparkir di lokasi tersebut sehingga mobil yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut terbalik.
- Bahwa benar terdakwa mengendarai mobilnya tersebut dalam keadaan mengantuk serta kondisi terdakwa saat itu dalam keadaan kehilangan kesadaran dan konsentrasi yang disebabkan terdakwa sebelum mengendarai kendaraan tersebut terdakwa mengkonsumsi minuman beralkohol jenis gold lebe dan bir putih di diskotik Retro dan obat narkotika jenis ekstasi hal ini sesuai dengan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : Lab-2100/NNF/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa urine dan darah milik terdakwa mengandung MDMA (-+)-N-a-dimestil-3,4 (Metilendioksi) yang mana MDMA (-+)-N-a-dimestil-3,4 (Metilendioksi) terdapat dalam golongan I urut 37 lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas jika dihubungkan dengan gradasi atau corak kesengajaan maka dapat disimpulkan bahwa walaupun perbuatan terdakwa tidak menghendaki kematian dari korban tetapi terdakwa menyadari kemungkinan yang akan terjadi jika terdakwa mengemudikan kendaraan dalam kondisi mengantuk dan dalam keadaan terpengaruh minuman beralkohol serta obat-obatan narkotika dapat membahayakan orang lain sehingga perbuatan terdakwa tersebut tergolong dalam kesegajaan sebagai kemungkinan atau dolus eventualis.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur Yang Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa akibat terdakwa yang mengemudikan kendaraan dalam keadaan mengantuk dan pengaruh alkohol serta obat-obatan narkotika hingga mobil yang dikemudikan terdakwa menabrak korban JEFFRY JAURY yang sedang berjan di atas trotoar jalan yang mengakibatkan korban JEFFRY JAURY meninggal dunia di lokasi tersebut dimana dari hasil pemeriksaan terhadap korban JEFFRY JAURY oleh Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : Ver/001-Mt/XII/2014/Forensik-Dokpol tanggal -1 Desember 2014 ditemukan :

- Terdapat luka terbuka di kepala bagian kiri dengan ukuran 5 cm x 0,5 cm.
- Terdapat luka robek di daun telinga kanan dengan ukuran 2 cm x 3 cm.
- Terdapat luka gores lecet disertai memar kemerahan di wajah :
 - a. Pipi kanan ukuran 10 cm x 5 cm.
 - b. Pipi kiri ukuran panjang 9 cm.
 - c. Dahi ke pelipis ukuran 8x4 cm.
 - d. Hidung ukuran panjang 2,5 cm.
- Terdapat luka robek di kelopak mata kanan dengan ukuran 3 cm x 0,5 cm.
- Terdapat luka lecet dan gores di bahu kiri dengan ukuran 7 cm x 5 cm.
- Terdapat luka gores di siku kiri.
- Terdapat luka gores di punggung tangan kiri.
- Terdapat luka gores di bahu kanan.
- Terdapat luka gores di lengan kanan.
- Tampak lengan bawah tangan kanan patah (fraktur).
- Terdapat luka gores di punggung tangan dan jari-jari tangan kanan.
- Teraba tulang kepala tengkorak belakang retak.

Dengan kesimpulan : Tampak luka terbuka pada kepala bagian kiri, dapat sesuai akibat benturan benda tumpul (akibat kecelakaan lalu lintas), penyebab kematian langsung korban yaitu adanya pendarahan otak akibat cedera kepala berat.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam analisa hukum di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu yakni Pasal 311 ayat (5) UU RI No. 22 Tahun 2009 dan oleh karena dakwaan kesatu telah terpenuhi maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang masing 1. Jie Heang Tjie 2. Irfan Amir, SE. yang pada pokoknya memberatkan Terdakwa sebagaimana termuat selengkapnya dalam berita acara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa saling menunjukkan kesesuaian sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan acara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang , bahwa oleh karena terbukti bersalah maka ia Terdakwa akan dijatuhi pidana yang dipandang setimpal dengan perbuatannya ;

Sebelum menjatuhkan pidana dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

- Yang memberatkan :
 - Terdakwa mengendarai kendaraan dalam pengaruh minuman beralkohol dan narkoba ;
 - Belum ada perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban;
- Yang meringankan :
 - Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
 - Terdakwa belum pernah dihukum ;

2. Analisis Penulis

Setelah memperhatikan amar putusan. Terlihat bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan pada terdakwa terhadap perkara Nomor 181/Pid.B/2015/PN/Mks sudah tepat. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan yang didasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap didepan persidangan dan oleh undang-undang yang telah ditetapkan sebagai hal yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, surat, barang bukti dan unsur-unsur delik yang didakwakan ditambah dengan hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Bapak Rianto Adam Pontoh, S.H., MHum (tanggal 20 Desember 2015) yang menerangkan bahwa putusan tersebut dijatuhkan berdasarkan atas tuntutan penuntut umum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, hal tersebut yang menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan pada perkara tersebut terdakwa dijerat dengan tindak pidana kelalaian lalu lintas pada Pasal 311 ayat (5) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Majelis Hakim juga menimbang apakah ada alasan yang dapat menjadi alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Namun, pada perkara ini tidak ditemukan dasar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa.

Oleh karena itu terdakwa dinyatakan harus dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Pada perkara ini putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hal ini disebabkan karena adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan. Adapun hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam perkara ini yaitu :

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa mengendarai kendaraan dalam pengaruh minuman beralkohol dan narkoba;
- Belum ada perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa beriskap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan disertai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, serta tuntutan pidana penuntut umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan, maka Majelis Hakim melakukan musyawarah dan berpendapat bahwa pidana yang diputuskan tersebut sudah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam Putusan No. 181/Pid.B/2015/PN.Mks, Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif yaitu kesatu Pasal 311 ayat (5) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan yang kedua Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009, surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil dan materil. Dalam tuntutan, Penuntut Umum menuntut terdakwa bersalah melakukan tindak pidana kelalaian lalu lintas Pasal 311 ayat (5) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan dakwaan kesatu, berdasarkan fakta-fakta hukum baik keterangan saksi maupun keterangan terdakwa serta unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan tersebut dianggap telah terbukti oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga antara perbuatan dan unsur-unsur pasal mencocoki rumusan delik.
2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam putusan Nomor : 181/Pid.B/2015/PN.Mks terdakwa dipidana dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun karena terbukti bersalah melakukan tindak

pidana dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Pertimbangan Hakim dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam perkara ini telah sesuai dimana hakim telah mempertimbangkan baik dari pertimbangan yuridis, fakta-fakta persidangan, keterangan para saksi, alat bukti yang ada, keyakinan hakim serta hal-hal yang mendukung. Dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, oleh karena terbukti bersalah maka terdakwa dijatuhi pidana yang dipandang setimpal dengan perbuatannya.

B. Saran

Melalui skripsi ini penulis menyampaikan beberapa saran yang terkait dengan penelitian penulis antara lain :

1. Selain pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku tindak pidana kelalain lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain, diharapkan pula Majelis Hakim dalam memutus perkara memperhatikan pula segi non yuridis dari perbuatan pelaku.

2. Hakim tidak serta merta berdasar pada surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan Pidana, melainkan pada dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Hakim harus lebih peka untuk melihat fakta-fakta apa yang timbul pada persidangan, sehingga dari fakta yang timbul tersebut, menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa dapat atau tidak dapat dipidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum, (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. PT. Toko Gunung Agung Tbl. Jakarta.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkan Education & PuKAP-Indonesia. Yogyakarta
- Bismar Siregar. 1983. *Hukum Acara Pidana*. Bina Cipta. Jakarta.
- H.B Sutopo, 2002. *Metodologi Penelitian Penelitian Kualitatif*. Gramedia Pustaka Utama. Surakarta.
- Kanter, E.Y. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana yang Penting*. PT. Tiara Ltd. Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT.Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Leden Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*. PT.Citra Aditya Bakti. Bandung.
- .Masruchin Ruba'i. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. UM PRESS. Malang.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta
- Rusli Efendy. 1989. *Azaz-Azaz Hukum Pidana*. LEPPEN-UMI. Ujung Pandang
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Citra Aditya.Jakarta.
- Sianturi,S.R. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* . Storia Grafika. Jakarta.
- Tongat. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. UMM Press. 59. Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. PT. Refika Aditama. Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan